



Melalui agenda *Women, Peace and Security* (WPS Agenda), Dewan Keamanan PBB telah mempromosikan reformasi gender dalam operasi perdamaian PBB sebagai upaya untuk meningkatkan daya tahan dan kualitas perdamaian. Agenda WPS menjadi pedoman universal, juga berlaku di Sudan Selatan sejak dikerahkannya *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS) di tahun 2011. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mandat gender yang ditetapkan oleh PBB dalam UNMISS dan dampaknya terhadap upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Sudan Selatan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka dalam pengumpulan data, tesis ini mengkaji mandat misi dari resolusi pertama hingga resolusi saat ini dan selanjutnya dilengkapi dengan peninjauan proses implementasinya termasuk penerapan strategi *gender balancing* dan *gender mainstreaming*. Tesis ini menggunakan konsep *gender audit* untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pemeliharaan perdamaian yang responsif gender. Temuan mengungkapkan kesenjangan antara mandat misi dan praktik operasionalnya, karena bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa komitmen berkelanjutan dalam mandat misi tidak selalu berarti implementasi yang kuat.

Kata Kunci: Sudan Selatan, UNMISS, Penjaga Perdamaian Perempuan, *Gender Balancing*, *Gender Mainstreaming*, *Gender Audit*

Abstract

With the adoption of The Women, Peace, and Security Agenda (WPS Agenda), The UN Security Council has promoted gender reform within peace operations as an effort to build a more durable and a better quality of peace. The WPS Agenda has become a universal agenda which is further applicable in South Sudan since the deployment of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) in 2011. Therefore, this thesis intends to examine the implementation of the gender mandate in UNMISS and its impact on achieving sustainable peace in South Sudan. Using qualitative method and literature review in data collection, this thesis examines the mission mandates from the first resolution to the current resolution and is further complemented by an overview of the implementation process including the implementation of gender balancing and gender mainstreaming strategies. This thesis uses the concept of gender audit to evaluate progress, identify gaps, and provide recommendations for enhancing gender-responsive peacekeeping efforts. The findings reveal a gap between the mission's mandates and its operational practices, as the evidence gathered suggests that a continued commitment stated in mission's mandates does not necessarily indicates a strong implementation.

Key words: *South Sudan, UNMISS, Women Peacekeepers, Gender Balancing, Gender Mainstreaming, Gender Audit*